

**ANALISIS KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR PERIODE TAHUN 2014-2016 DENGAN PENDEKATAN VALUE
FOR MONEY**

Sri Supadmini¹⁾, Indri Kristiani²⁾

¹⁾Prodi Akuntansi, STIE Nusa Megarkencana
email: s.supadmi70@gmail.com

²⁾Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
email: Indrikristiani9@gmail.com

This study aims to determine and analyze the performance of the Bogor District Revenue Service for the 2014-2016 period. The type of data in this study is secondary data, in the form of the Financial Institutional Performance Accountability Report (LAKIP) of the Bogor Regency Regional Revenue Service for three years, namely 2014, 2015 and 2016. The data collection techniques used were documentation techniques. The data analysis method used is quantitative descriptive analysis method. The results of the study show that the performance of the Bogor Regency Regional Revenue Service in terms of the six program activities is carried out economically, efficiently and effectively.

Keywords: *Performance, Public Sector, Value For Money*

1. PENDAHULUAN

Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor publik pada umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan utama sektor publik adalah menjalankan kegiatan utamanya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat). Sedangkan pengertian Akuntansi Sektor Publik diartikan menurut Indra (2001,6) sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik sebagai organisasi sektor publik dituntut agar lebih efisien dalam mengelola biaya sosial dan ekonomi dalam memanfaatkannya untuk publik dan pelaksanaannya dilaksanakan secara transparan. Tuntutan dari masyarakat adanya transparansi dalam pemanfaatan dan pengelolaan biaya sosial dan ekonomi ini menjadikan praktek akuntansi sektor publik saat ini menjadi dapat cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan guna mengelola urusan-urusan publik karena adanya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas (pertanggungjawaban) publik karena adanya oleh pemerintah pusat, daerah, unit kerja

**)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana*

pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara (sektor publik). Tuntutan lain adanya transparansi tersebut juga mendorong diterapkannya Value For Money dalam menjalankan aktifitas kegiatannya bagi organisasi sektor public.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Menurut (Mardiasmo, 2009 : 4) *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (hematcermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pada konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Menurut Demi (2014) kinerja Dinas Pertanian DIY ditinjau dari elemen ekonomis telah menjalankan keseluruhan program secara ekonomis dengan menghasilkan penghematan biaya pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani melakukan penghematan tahun 2011 sebesar Rp. 141.626.730 dengan output yang cukup maksimal yaitu 99,29% dan tahun 2012 sebesar Rp.26.809.810 dengan output 100%, pada program Peningkatan Ketahanan Pangan dapat melakukan penghematan tahun 2011 sebesar Rp.67.823.730 dan tahun 2012 sebesar Rp.54.412.810 dengan output mencapai 100%, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dapat melakukan penghematan tahun 2011 sebesar Rp.38.848.800 dan tahun sebesar Rp.15.386.400 dengan output 100%. Berdasarkan elemen efisiensi diketahui bahwa Dinas Pertanian Istimewah Yogyakarta pada periode tahun 2011-2012 telah menjalankan programnya dengan efisien. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani memperoleh rasio efisiensi tahun sebesar 122,1% dan 110,98%, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dengan rasio efisiensi tahun 2011 dan 2012 masing-masing 103,44% dan 110,56 dengan 106,03% dan 102,88%. Berdasarkan hasil ditinjau dari elemen efektivitas diketahui bahwa Dinas Pertanian Istimewah Yogyakarta pada periode tahun 2011 telah menjalankan keseluruhan programnya dengan dua program dapat dikatakan efektif, yaitu program Peningkatan Ketahanan Pangan dan program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dengan rasio efektivitas keduanya mencapai 100%, sedangkan pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani kurang efektif, karena pada pelaksanaannya tahun 2011 capaian kinerja yang dihasilkan kurang maksimal yaitu sebesar 99,29%, sedangkan pada periode tahun 2012 telah menjalankan seluruh programnya dengan

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

efektif. Rasio efektivitas pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani, program Peningkatan Ketahanan Pangan, dan program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian mencapai 100%.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu yang menjadi perhatian masyarakat dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat. Berdasarkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor“ yakni **Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Menjadi Dinas Pendapatan Daerah Termaju Se-Indonesia** “berdasarkan tersebut Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bogor akan terus meningkatkan sumber daya pengawasan terutama keahlian, keterampilan dan integritas untuk mewujudkan lembaga pengawasan yang profesional, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bogor melalui pengawasan yang dilaksanakan Dinas pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selama ini dinilai dari aspek *input* dan *output*. S u a t u Instansi dinilai cukup berhasil jika bisa menyerap anggaran 100% (*input*) dan melaksanakan program tahunan (*output*), tanpa ada penilaian terhadap aspek hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan juga dampak (*impact*). Oleh karena itu diperlukan ukuran non finansial dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor menggunakan metode *Value for Money* meliputi pengukuran berdasarkan segi Ekonomis, Efisiensi dan Efektifitas.

2. KAJIAN LITERATUR

Definisi penilaian kinerja menurut (Mahmudi, 2005 : 7), merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut (Mahmudi, 2010 : 7) Pengukuran Kinerja adalah penentuan atau penilaian secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Elemen-elemen indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (*Input*). Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dapat dibedakan menjadi input primer (kas) dan Input sekunder (bahan baku, SDM, dan infrastruktur). Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Proses dapat berbentuk program atau aktivitas. Ukuran input mengindikasikan jumlah sumberdaya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas, atau organisasi. Pengukuran input dilakukan untuk mengetahui harga per unit input dengan membandingkan input sekunder dengan input primer. Indikator input yang digunakan adalah Indikator finansial berupa anggaran. Indikator input diperlukan untuk mengukur tingkat ekonomi.

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

2. Indikator Keluaran (*Output*). Output merupakan hasil langsung dari suatu proses, misalnya jumlah operasi yang dilakukan oleh dokter bedah, jumlah lulusan perguruan tinggi, dan panjang jalan yang dibangun. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau kegiatan. Pengukuran output berbentuk kuantitatif keuangan dan kuantitatif non keuangan.
3. Indikator Hasil (*Outcome*). Outcome mengukur apa yang telah dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan bisa berupa target kinerja yang diharapkan, sedangkan outcome adalah hasil nyata yang dicapai. Tujuan pengukuran outcome adalah untuk mengukur nilai kualitas output dari suatu aktivitas atau program. Kualitas output dalam arti yang lebih luas adalah dampak terhadap masyarakat. Pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas atau pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik terhadap masyarakat. Pengukuran outcome tidak dapat dilakukan sebelum program selesai dilaksanakan, atau program tersebut telah mencapai tahap tertentu. Pengukuran outcome membutuhkan waktu yang panjang.
4. Indikator manfaat (*Benefit*). Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari pencapaian tujuan program. Manfaat baru tampak setelah beberapa tahun kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal, contohnya manfaat program Keluarga Berencana (KB) dengan terkendalinya angka kelahiran.
5. Indikator Dampak (*Impact*). Indikator dampak memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari hasil kegiatan baik positif maupun negatif. Pengukuran *impact* dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil program dengan asumsi keadaan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada. Pengukuran *impact* diusahakan sampai pada penentuan manfaat dan biaya sosial secara finansial. Pengukuran *impact* dilakukan melalui studi perbandingan tertentu, misalnya antarkurun waktu (*time series*), dan tidak cukup dengan pengumpulan data untuk satu waktu.

Value for Money menurut (Mardiasmo, 2009 : 4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu:

1. Ekonomis. Ekonomis dalam arti kehematan yang mencakup hati-hati dan cermat (*prudence*). Dalam pengadaan alokasi sumber daya, serta perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait pada sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi menggambarkan hubungan antara harga pasar dan masukan (*cost of input*) atau dengan kata lain ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

(*spendingless*). Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu ada.

2. Efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas dalam arti berdaya guna dalam penggunaan sumberdaya, dimana penggunaan sumberdaya diminimalkan dan hasilnya yang dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*). Efisiensi merupakan perbandingan output/input (*cost of output*) yang digunakan dengan dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.
3. Efektifitas. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran dari target kegiatan (berhasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*).

Menurut (Mardiasmo, 2009 : 130) Peran indikator kinerja pada *Value for Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator *Value for Money* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)
Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)
Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan. Unit penelitian dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dan unit analisis yang digunakan adalah Anggaran dan laporan realisasi program pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data sekunder berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selama tiga tahun yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.

Alat analisis data dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga elemen yaitu:

1. Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. (Mardiasmo, 2009 : 4) menyebutkan bahwa ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan *input value*. *Input* dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran. Suatu kinerja

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dan dapat mencapai *output* sesuai dengan yang ditetapkan. Secara matematis pengukuran elemen ekonomi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Ekonomi = \frac{Input}{Input\ Value}$$

Skala penilaian elemen ekonomi berdasarkan indikator ekonomi ditunjukkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Skala Penilaian Elemen Ekonomi.

Presentase	Penilaian
90 – 100 %	Sangat Ekonomis
80 – 89,99 %	Ekonomis
70 – 79,99 %	Cukup Ekonomis
60 – 69,99 %	Kurang Ekonomis
< 59,99 %	Tidak Ekonomis

Sumber : (Prasetyo dkk, 2010)

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi (Indra Bastian, 2006 : 280). Elemen efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu; efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendaya gunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu (Mardiasmo, 2009 : 133). Penilaian elemen efisiensi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Output: keluaran yangdicapaidarisuatu kegiatan/program

Input: segala sumber daya yang digunakan untukmelaksanakan suatu kegiatanatau program.

Penilaian Elemen indikator ekonomi ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penilaian Elemen Efisien.

Presentase	Penilaian
> 100 %	Sangat Efisien
80 – 99,99 %	Efisien
70 – 79,99 %	Cukup Efisien
60 – 69,99 %	Kurang Efisien
< 59,99 %	Tidak Efisien

Sumber : (Prasetyo, dkk, 2010)

3. Pengukuran Efektivitas

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009 : 134). Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif.

Penilaian elemen Efektifitas dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Capaian\ Kinerja}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran elemen Efektifitas ditunjukkan pada tabel Tabel 3 berikut:

Tabel 3. SkalaPegukuran efektifitas

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	<55	Kurang

Sumber : (Prasetyo, dkk, 2010)

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Kinerja Elemen Ekonomis

Penilaian kinerja berdasarkan elemen Ekonomi keseluruhan Program Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ditunjukkan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Perbandingan Presentasi Ekonomi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2014-2016

Program (Dalam Sektor)	Kegiatan	Bogor		
		2014	2015	2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	73,72%	67,48%	59,35%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94,88%	98,29%	95,06%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	93,19%	82,33%	70,18%
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	48,46%	99,76%	97,68%
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	92,78%	47,55%	47,62%
Rata-rata Nilai Ekonomis Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		80,61%	79,08%	73,98%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	93,29%	96,39%	96,85%
	Pengadaan Peralatan Kantor	80,27%	92,42%	92,44%
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	65,64%	94,91%	94,91%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	44,82%	96,82%	96,82%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	73,09%	87,15%	84,90%
Rata-rata Nilai Ekonomis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		71,42%	93,54%	93,18%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	86,21%	96,70%	94,92%
Rata-rata Nilai Ekonomis Program Peningkatan Disiplin Aparatur		86,21%	96,70%	94,92%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100,00%	100,00%	100,00%
	Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur	70,01%	63,13%	62,35%
Rata-rata Nilai Ekonomis Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		85,01%	81,57%	81,18%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96,69%	93,00%	90,33%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100,00%	100,00%	87,29%

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100,00%	100,00%	100,00 %
	Penyusunan Perencanaan Anggaran	88,55%	69,95%	69,95%
	Penatausahaan Keuangan SKPD	96,42%	67,35%	63,20%
	Publikasi Kinerja SKPD	100,00%	75,00%	75,00%
Rata-rata Nilai Ekonomis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		96,94%	84,22%	80,96%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	93,98%	96,89%	96,30%
	Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	94,96%	93,53%	92,90%
	Pendataan Wajib Pajak Daerah	94,02%	82,38%	82,39%
	Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	89,73%	80,06%	79,54%
	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	83,11%	88,15%	83,47%
	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	96,59%	89,14%	89,15%
	Verifikasi Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan	50,21%	84,52%	84,52%
Rata-rata Nilai Ekonomis Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		86,09%	87,81%	86,90%
Rata-rata Ekonomis Keseluruhan Program		84,38%	87,15%	85,19%

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil penilaian kinerja elemen Ekonomis pada tabel 4 dapat menunjukkan bahwa kinerja elemen ekonomi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran periode 2014-2016 secara mengalami fluktuasi. Tahun 2014 ke tahun 2015 kinerja elemen ekonomis mengalami kenaikan, tahun 2014 elemen ekonomis mencapai 84,38% tahun 2015 naik menjadi 87,15% dan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 85,19%. Fluktuasi kinerja elemen ekonomis periode 2014-2015 disebabkan terjadinya pemborosan anggaran dari 6 program yang dilaksanakan sehingga output yang dihasilkan menurun. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah dan dan penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian mengalami penurunan yang berarti adanya pemborosan anggaran yang berdampak pada penurunan output. Pada Program penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran mengalami peningkatan pada tahun 2015 dari tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2016.

Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berdasarkan elemen ekonomis mengalami fluktuasi pada tahun 2014-2016 tetapi terdapat kecenderungan meningkat, hal ini dikarenakan program tersebut dapat menghemat anggaran tetapi output yang dihasilkan meningkat. Kinerja berdasarkan elemen ekonomi secara keseluruhan tahun sebesar 71,425, Tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 93,53, dan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 93,15%. Kecenderungan peningkatan kinerja elemen ekonomis terjadi pada kegiatan Pengadaan kendaraan

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

dinas/operasional, pengadaan peralatan kantor, pengadaan perlengkapan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor mengalami fluktuasi.

Kinerja program Peningkatan Disiplin Aparatur berdasarkan elemen ekonomis mengalami fluktuasi pada tahun 2014-2016 dikarenakan terjadinya penurunan realisasi pengeluaran atau penghematan dalam pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan. Tahun 2014 kinerja elemen ekonomi sebesar 86,21%, tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi sebesar 96,70% dan tahun 2016 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 94,92%

Kinerja program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berdasarkan elemen ekonomis mengalami penurunan pada setiap tahunnya dikarenakan terjadinya pemborosan anggaran sehingga realisasi anggaran naik. Pada tahun kinerja elemen ekonomi secara keseluruhan tahun 2014 sebesar 85,01%, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 81,57% dan tahun 2016 menjadi sebesar 81,18%. Penurunan kinerja ini disebabkan karena penurunan kinerja pada kegiatan pembinaan mental dan rohani bagi aparatur dan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal stabil yaitu realisasi sebesar anggaran.

Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berdasarkan elemen ekonomis tahun 2014-2016 mengalami penurunan, tahun 2014 sebesar 96,94%, tahun 2015 sebesar 84,22%, dan tahun 2016 sebesar 80,96%. Penurunan kinerja terjadi karena penurunan kinerja pelaksanaan seluruh pada program ini meliputi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, Penatausahaan Keuangan SKPD dan Publikasi Kinerja SKPD selama tahun 2014-2016.

Kinerja program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasar elemen ekonomis mengalami fluktuasi pada tahun 2014-2016. Fluktuasi kinerja tersebut disebabkan karena terjadinya fluktuasi kinerja pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, pendataan wajib pajak daerah, Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah, penerbitan dan pendistribusian dokumen ketetapan pajak daerah, dan Verifikasi Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Kecenderungan penurunan kinerja disebabkan karena penurunan kinerja pelaksanaan kegiatan perhitungan dan penetapan pajak daerah, pendaftaran wajib pajak daerah.

Berdasarkan uraian tersebut kinerja elemen ekonomis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor secara keseluruhan pelaksanaan 6 program pada tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi yang disebabkan karena adanya pemborosan realisasi anggaran sehingga output yang dihasilkan tidak maksimal yang berdampak penurunan kinerja.

Pengukuran Kinerja Elemen Efisiensi

Pengukuran kinerja elemen efisiensi pelaksanaan program Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada periode 2014-2016 ditunjukkan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Pengukuran Efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Periode Tahun 2014-2016

**)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana*

Program	Efisiensi		
	2014	2015	2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	204,71%	137,65%	113,14%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	632,85%	398,91%	362,45%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	136,17%	117,39%	117,06%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	426,44%	417,71%	396,34%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	668,21%	712,45%	711,69%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	226,16%	167,57%	139,49%
Rata Kinerja Efisiensi	382,42%	325,28%	306,70%

Sumber: Data Diolah, 2017

Pada tabel 5 menunjukkan kinerja elemen efisiensi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Kinerja elemen efisiensi program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada tahun 2014 sebesar 204,71%, tahun 2015 sebesar 137,65% dan tahun 2016 sebesar 113,14%.

Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2014-2016. Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2014 sebesar 632,85%, tahun 2015 sebesar 398,91% dan tahun 2016 sebesar 362,45%.

Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan Disiplin Aparatur tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan Disiplin Aparatur tahun 2014 sebesar 136,17%, tahun 2015 sebesar 96,70% dan tahun 2016 sebesar 117,06%.

Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2014 sebesar 426,44%, tahun 2015 input sebesar 417,71% dan tahun 2016 sebesar 396,34%.

Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tahun 2014 sebesar 668,21%, tahun 2015 sebesar 712,45%, dan tahun 2016 sebesar 711,69%.

Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Kinerja elemen efisiensi Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2014 sebesar 226,16%, tahun 2015 sebesar 167,57% dan tahun 2016 sebesar 139,49%.

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada keseluruhan Program Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2014 dapat dikatakan Sangat Efisien karena rata-rata kinerja keseluruhan >100%.

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

Kinerjatertinggi elemen efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor periode 2014-2016 adalah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan karena efisiensinyamencapai >700%, Artinya program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan merupakan program yang dalam pelaksanaannya paling efisien. Sedangkan Kinerja terendah elemen efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor periode 2014-2016 adalah pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengukuran Efektifitas

Perhitungan kinerja dari elemen efektifitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada periode 2014-2016 disajikan pada tabel 6berikut :

Tabel 6.Pengukuran Efektifitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Periode Tahun 2014-2016

Program	Efektifitas		
	2014	2015	2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	165,01%	108,85%	83,70%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	452,00%	373,13%	337,75%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	117,39%	112,00%	111,11%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	362,50%	340,70%	321,74%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	647,78%	600,00%	576,19%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	194,69%	147,14%	121,21%
Rata-rata Kinerja Efektifitas	323,23%	280,30%	293,60%

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil penilaian kinerja elemen efektifitas pada tabel 6 menunjukkan bahwakinerja elemen efektifitas program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Kinerja elemen efektifitas program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2014 sebesar 165,01%, tahun 2015 sebesar 108,85% ,dan tahun 2016 83,70%. Penurunan kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran berdasarkan pengukuran efektifitas disebabkan penurunan capaian kinerja dibandingkan dengan target.

Kinerja elemen efektifitas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2014-2015 mengalami penurunan. Kinerja elemen efektifitas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2014 sebesar 452,00%, tahun 2015 sebesar 337,75% , dan tahun 2016 sebesar 337,75%

**)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana*

Kinerja elemen efektifitas Program Peningkatan Disiplin Aparatur tahun 2014-2015 mengalami penurunan. Kinerja elemen efektifitas tahun 2014 sebesar 117,39%, tahun 2015 sebesar 112,00%, dan tahun 2016 sebesar 111,11%.

Kinerja elemen efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Kinerja elemen efektifitas tahun 2014 sebesar 362,50%, tahun 2015 sebesar 340,70%, dan tahun 2016 sebesar 321,74%.

Kinerja elemen efektifitas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Kinerja elemen efektifitas tahun 2014 sebesar 647,78%, tahun 2015 sebesar 600,00%, tahun 2016 sebesar 576,19%.

Kinerja elemen efektifitas Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Kinerja elemen efektifitas tahun sebesar 194,69%, tahun 2015 sebesar 147,14%, dan tahun 2016 sebesar 121,21%.

Kinerja rata – rata elemen efektifitas keseluruhan program tahun 2014-2016 mengalami penurunan sebesar Tahun 2014 sebesar 323,23%, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 280,30% dan 2016 naik menjadi sebesar 293,60.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada keseluruhan Program Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sudah dikatakan sangat efektif diatas 100%. program yang tingkat efektifitasnya paling tinggi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan karena efektifitas mencapai >500% selama tahun 2014-2016.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian uraian sebelumnya hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor periode 2014-2016 berdasarkan penilaian kinerja elemen ekonomis mengalami fluktuasi dan dapat dikategorikan Ekonomis.
2. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor periode 2014-2016 berdasarkan penilaian kinerja elemen efisiensi mengalami penurunan dan dapat dikategorikan sangat efisien.
3. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor periode 2014-2016 berdasarkan penilaian pengukuran efektifitas mengalami fluktuasi dan dapat dikategorikan sangat efektif.

4. REFERENSI

Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.

Demi Aulia Arfan. (2014). Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.

Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang *Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara*

Keputusan Kepala Lan No.239/IX/6/8/2003

Laporan *Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014*, (Online),

(<https://dispenda.bogorkab.go.id/uploads/images/DISPENDA/LAKIP%202014>).Diakses pada 17 April 2017.

Laporan *Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015*, (Online),

(<https://dispenda.bogorkab.go.id/uploads/images/DISPENDA/LAKIP%202015>,

Diakses pada 17 April 2017.

Laporan *Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016*, (Online),

<https://dispenda.bogorkab.go.id/uploads/images/DISPENDA/LAKIP%202016>), Diakses pada 17 April 2017.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua. UPP STIM YKPN :Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo.(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: BPFE.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana